

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Jalan Patriot No. 14, ☎ (0262) 231590 Garut

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadhirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan karuniaNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut ini dapat diselesaikan.

LAKIP disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP TahUn 2021 diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut sebagai salah satu prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Untuk menuju kearah organisasi pemerintahan yang dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan para *stake holder* nya, maka ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan LAKIP ini meliputi :

1. Tugas pokok dan fungsi organisasi
2. Program kerja yang menjadi isu strategis pembangunan daerah
3. Aktivitas organisasi yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten garut

Kami berharap penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2021 dapat digunakan sebagai perangkat evaluasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, transparan dan bertanggungjawab.

Garut, Januari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN GARUT



Ir. H. Sofyan Yani, M.Si
NIP. 19630627 1999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut merupakan cakupan siklus lengkap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan strategik, perencanaan kinerja, persetujuan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menetapkan tujuan pembangunan yaitu ” Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan dalam mendorong peningkatan PDRB Perkapita” yang merupakan penjabaran dari Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Garut TA. 2019-2024 yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan” serta sasaran Indikator Kinerja Utama Bupati Garut yaitu “Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal” dengan indikator PDRB Perkapita 26.53 juta.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun Anggaran 2021, pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan terdiri dari Sembilan indikator yaitu (1) Jumlah produksi perikanan budidaya, (2) jumlah produksi perikanan tangkap, dan (3) produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan, (4) Tingkat Konsumsi Ikan, (5) Cakupan Bina Kelompok Nelayan (6) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan, (7) Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman, (8) Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial, dan (9) Nilai Tukar Nelayan. Hasil dari sembilan indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 117,77 % dengan kriteria **“BAIK”**.

- Sasaran 2. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan terdiri dari empat indikator yaitu (1) produksi daging, (2) produksi telur, (3) produksi susu dan (4) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan; dan (5) Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%). Capaian rata-rata mencapai sasaran sebesar 101,90 % dengan kriteria **“Baik”**.

Capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2021 mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha peternakan dan perikanan sudah bisa bertahan ditengah wabah pandemik Covid 19. Pandemi Covid 19 belum begitu mempengaruhi sektor perikanan dan peternakan. Tetapi dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, menyebabkan harga sejumlah komoditas perikanan dan peternakan ikut menurun sehingga mempengaruhi pencapaian target produksi. Selain itu, dampak pandemik menyebabkan peternak, pembudidaya ikan dan nelayan terpaksa mengurangi biaya produksi untuk menekan pengeluaran sehingga berdampak pada tidak tercapainya target produksi yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2021, Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan program kegiatan sebanyak 8 program dan 37 kegiatan dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 20.725.623.873,- Realisasi Keuangan sebesar Rp. 19.196.831.499,- tercapai sebesar 92,62 % sedangkan untuk Realisasi Fisik Pekerjaan sebesar 100 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan dapat diketahui bahwa rata-rata indikator kinerja kegiatan mencapai target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi dan efektifitas terhadap program pembangunan melalui pengukuran *input*, *output* dan *outcome*, capaian indikator kinerja seluruhnya adalah “Efisien dan Efektif”.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan sepanjang tahun anggaran 2021 tidak terlepas dari berbagai kendala yang disebabkan faktor eksternal maupun internal.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target kerja 2021 antara lain:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat calon penerima bantuan karena keterbatasan anggaran dan SDM;
- Belum optimalnya pembinaan, monitoring dan pengawasan kegiatan sehubungan dengan keterbatasan petugas teknis dan wilayah kerja yang luas;
- Tidak semua kegiatan yang telah direncanakan dalam RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA/RKT dapat dilaksanakan karena keterbatasan ketersediaan anggaran pemerintah daerah;
- Belum optimalnya koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan belum seluruhnya mendukung target kinerja yang diharapkan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif yang dapat meminimalisasi hambatan/kendala di dalam pencapaian target. Untuk tahun anggaran berikutnya perlu dilakukan evaluasi dan analisis kinerja dengan lebih intensif sehingga memungkinkan mengidentifikasi sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja yang lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan para *stakeholder*. Hal tersebut perlu diwujudkan dengan tetap berlandaskan pada Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik

Untuk mewujudkan pembangunan sektor Perikanan dan Peternakan dimasa yang akan datang, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan antara lain:

- Mendorong kemandirian masyarakat dalam berusaha serta meningkatkan akses terhadap berbagai sumber pembiayaan baik bersumber dari pendanaan pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat;
- Mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan aparatur serta peningkatan jumlah tenaga teknis;

- ✓ Optimalisasi pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara sesuai ketersediaan anggaran;
- ✓ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- ✓ Meningkatkan sinergitas antara perencanaan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah;
- ✓ Meningkatkan koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan bisa bersinergi dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Demikian Ringkasan Eksekutif ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan pedoman untuk arah kebijakan Pembangunan Perikanan dan Peternakan di masa yang akan datang.

